

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas - Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR OF TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 2021, maka perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) seagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dengan daftar pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

- Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, mengawasi/monitoring dan evaluasi.
- 2. Membuat laporan kegiatan setiap bulan berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan.
- Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala badan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA: DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA BADAN-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAMAH LAUT,

H. RUDI ISMANTO

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 07 Tahun 2023 TANGGAL : 02 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

_	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
0		2	3	4
1	3			
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		191	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kerjasama Kebudayaan	Anggota	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Pelaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kabid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kerjasama Kebudayaan	Anggota	
_				
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan			
_	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	

10	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET
1	3	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	
		2	3	4
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
		Analis Pengaduan Masyarakat	Anggota	
	Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
	3. Pelaksangan Forum Koordingsi Dimping Day 1 Kil	Analis Pengaduan Masyarakat	Anggota	
	3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Anggota	
		Analis Pengaduan Masyarakat	Anggota	
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,	Kabid Bina Ideologi & Waswasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Kebangsaan	Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Wawasan Kebangsaan	Anggota	
		Analis Kerjasama	Anggota	
		Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	

О	PROGRAM/KEGIATAN/BUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	Kebangsaan	Kabid Bina Ideologi & Waswasan Kebangsaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Wawasan Kebangsaan	Anggota	
		Analis Kerjasama	Anggota	
		Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	The second secon		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kabid Politik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Partai Politik	Anggota	
		Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota	
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situas Politik di Daerah	i Kabid Politik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Partai Politik	Anggota	
		Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota	

О	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Ali	Kabid Politik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	· .
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Kebijakan Muda	Anggota	
		Analis Partai Politik	Anggota	
		Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Anggota	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
_	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Analis Tata Laksana	Anggota	
		Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
-	1. Pengadaan Mebel	Analis Tata Laksana	Anggota	
-	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Analis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadministrasi Umum	Anggota	
_	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengemudi	Anggota	

o	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			•
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Analis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
		Pengadministrasi Umum	Anggota	
		Pengemudi	Anggota	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Analis Tata Laksana	Anggota	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadministrasi Umum	Anggota	
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengemudi	Anggota	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Keglatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
_	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bendahara	Anggota	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Analis Perencanaan	Anggota	
_		Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
_		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	
_				
_	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	3	2	3	4
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bendahara	Anggota	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Analis Perencanaan	Anggota	•
		Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

H. RUDI ISMANTO